

Volume 1 | No.1 | Edisi : Juli – Desember 2012 | ISSN : 2302-4585

JURNAL

Kompetitif



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Kompetitif

Vol. 1

No. 1

Hal : 1 - 113

Palembang, September 2012

ISSN: 2302 - 4585

KOMPETITIF

Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang

Dewan Redaksi

- Pelindung : Prof. Dr. Ir. Edizal AE (Rektor)
- Pembina : Syaiful Sahri,SE.MSi (Dekan Fakultas Ekonomi)
Prof. Dr. H. Sulbahri Madjir, SE.,M.M
- Pimpinan Umum : Hj.Nina Fitriana, SE.,M.Si
- Ketua Penyunting : Msy.Mikial,SE.,Ak.,M.Si
- Penyunting Ahli : Prof. Dr. H. Masngudi, APU (Universitas Borobudur)
Prof. Dr. H. Sulbahri Madjir, SE.,M.M (UTP)
Prof. Dr. H.Taufiq Marwah, SE.,M.Si (Universitas Sriwijaya)
Dr. Kamaluddin,SE.,M.M (Universitas Bengkulu)
Dr. Helmi Yazid,SE.,M.Si (Univ. Sultan Ageng Tirtayasa)
- Penyunting Pelaksana : Sugiri Dinah, SE.,M.Si, Amrillah Azrin,SE.MM,
Lusia Nargis, SE.,M.Si, Rizal Effendi,SE.MSi
- Sekretariat : Muhammad Said, SE.MSi (Pembantu Umum)
: Ernawati.SE.Ak (Keuangan)
: Yun Suprani,SE.MSi (Administrasi)
- Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang
- Alamat Redaksi : Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang
Jl. Kapt. Marzuki No.2446 Kamboja Palembang 30129
Telp. 0711-354654 E-mail : redaksi.fe_utp@yahoo.co.id

Jurnal "**Kompetitif**" adalah jurnal ilmiah untuk mempublikasikan hasil penelitian dan kajian analisis kritis dalam bidang manajemen, akuntansi dan perbankan. Jurnal ini terbit 2 (dua) kali dalam setahun (Januari, Juli) dan bertujuan untuk menyebarkan hasil-hasil penelitian dan kajian analisis kritis dalam bidang manajemen, akuntansi dan perbankan kepada masyarakat ilmiah.

KOMPETITIF

Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Tridianti Palembang

DAFTAR ISI

Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Pasar Kota Pagar Alam
Kamsrin Sa'i 1 - 11

Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin
Msy. Mikial 12 – 20

Analisis Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
Rizal Effendi 21 – 32

Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Propinsi Sumatera Selatan
Amrillah Azrin 33 - 42

Analisa Hubungan Kekayaan Bersih Wajib Pajak Badan Dengan Beban Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur
Sonang PP 43 - 57

Persepsi Konsumen Terhadap Persaingan Antar Merek Melalui Iklan (Studi Kasus Persaingan Antar Produk Deterjen Rinso Dan So Klin)
Lusia Nargis 58 - 69

Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pendidikan dan Tanggungan Keluarga Terhadap Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan di Kecamatan Ilir Timur II Palembang
Meti Zuliyana 70 – 78

Evaluasi Kinerja Keuangan Perusahaan Daerah Prodexim Palembang
Kusminaini Armin 79 – 90

Pengaruh Disiplin Kerja dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Palembang
Nina Fitriana , Agustina M 91 – 100

Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik Dan Prinsip *Value For Money* Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)
Rosalina Pebrica Mayasari 101 – 113

**PENGARUH AKUNTABILITAS PUBLIK, PARTISIPASI MASYARAKAT,
TRANSPARANSI KEBIJAKAN PUBLIK DAN PRINSIP VALUE FOR
MONEY TERHADAP PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD)**

Rosalina Pebrica Mayasari ^{*)}

ABSTRACT

This research examines the effect of public accountability, public participation, public policy transparency and value for money principles on local finance (APBD). Sample of research using purposive sampling was a member of the board of the Commission for Economic and Financial (Commission III) and a member of Budget Council of DPRD Sumatera Selatan Province. The research proved that according to simultaneous public accountability, public participation, public policy transparency and value for money principles have had effects on local finance (APBD). In partial known that only public accountability and value for money principle influenced on local finance (APBD). While, public participation and transparency of public did not affect on local finance (APBD).

Keywords: Public Accountability, Public Participation, Public Policy Transparency, Value for Money Principles, Local Finance (APBD)

A. PENDAHULUAN

Di era reformasi saat ini telah terjadi perubahan sistem politik, sosial kemasyarakatan dan ekonomi yang menimbulkan tuntutan terhadap terciptanya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pada prinsipnya terdapat tiga sendi utama terciptanya tata pemerintahan yang baik yakni akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Jika ketiga sendi ini berjalan dengan efektif maka tata pemerintahan yang baik akan berjalan dengan efektif pula (Pohan, 2000:4).

Selain akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi

kebijakan publick, faktor penting lain dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah adanya pengelolaan anggaran yang baik (*Good Financial Governance*). Tercapainya pengelolaan anggaran yang baik tidak terlepas dari adanya pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri. Selain dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran itu sendiri, pengawasan juga dilakukan oleh lembaga legislatif dan lembaga pengawas khusus (*oversight body*) yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran (APBD).

^{*)} Dosen Fakultas Ekonomi UTP

Pengawasan anggaran (APBD) diperlukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis (Wardayani, 2010:2).

Pengelolaan anggaran (APBD) yang baik merupakan penerapan prinsip *Value for Money* (VfM) dan mutlak dilakukan pembuat anggaran dalam hal ini adalah eksekutif. Implementasi prinsip *value for money* diyakini dapat memperbaiki kinerja sektor publik khususnya dalam hal penganggaran sektor publik. *Value for Money* merupakan prinsip pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama, yaitu : ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. *Value for Money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Mardiasmo, 2002).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 132 menjelaskan bahwa: DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pasal 133 menjelaskan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan

daerah perpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehubungan dengan hal itu maka peran Dewan menjadi sangat meningkat dalam mengontrol kebijakan Pemerintah. DPRD sebagai Lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu: 1) fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), 2) fungsi anggaran (fungsi menyusun anggaran), 3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja Eksekutif).

Istilah keuangan daerah tidak terlepas dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) karena keuangan daerah dituangkan sepenuhnya kedalam APBD. APBD menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah .

Saragih (2003) dalam Maryono, Warella, Kismartini (2007) mengatakan terdapat lima prinsip dasar dalam mengelola keuangan publik yaitu : (1) transparansi, (2) efisien, (3) efektif, (4)

akuntabilitas, (5) partisipasi. Akuntabilitas berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijaksanaan atau program. Menurut Mursyidi (2009) Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang undangan. Mardiasmo (2006) menyatakan *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga jenis elemen utama yaitu, ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Achmadi dan Muslim (2002) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan otonomi daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Sopanah (2003) membuktikan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) dan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap

pengawasan keuangan daerah (APBD), sedangkan interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Wardayani (2010) membuktikan bahwa pengetahuan dewan tentang Anggaran, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Sedangkan interaksi komitmen profesional terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Mayasari (2011) membuktikan bahwa hubungan antara kualitas anggota dewan dengan pengawasan APBD dipengaruhi oleh akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat, sedangkan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan kualitas anggota dewan dengan pengawasan APBD.

Fenomena yang terjadi di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa dari laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota menunjukkan bahwa

provinsi Sumatera Selatan mendapat predikat cukup baik atau skor nilai 50-65 (Kompas, 2011). Handayani (Kompas,2010) menyatakan tingkat transparansi dari instansi Pemerintah Sumatera Selatan baru mencapai 30-40 persen, lebih jauh lagi sejumlah instansi belum memiliki pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) walaupun keberadaan PPID telah diatur dalam Permendagri No. 35 Tahun 2010. Hal ini menunjukkan masih belum optimalnya akuntabilitas publik dan transparansi kebijakan publik dalam pengawasan APBD.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Prinsip *Value For Money* baik secara simultan maupun parsial terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Prinsip *Value For Money* baik secara simultan maupun parsial terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan prinsip *value for money* baik secara simultan maupun parsial terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD) oleh anggota dewan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pemerintah dan DPRD untuk menjadi masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya akan meningkatkan peran anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah (APBD). Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif yaitu penelitian yang mengukur hubungan sebab akibat dua variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dan terikatnya (Kuncoro, 2009: 15). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode survey dengan cara membagikan kuesioner kepada responden. Kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel akuntabilitas publik, partisipasi

masyarakat, transparansi kebijakan publik dan pengawasan APBD merupakan kuesioner yang dibuat oleh Pramita dan Andriyani (2010), sedangkan untuk mengukur variabel prinsip *Value for Money* menggunakan kuesioner yang dibuat oleh Siregar (2011).

Masing-masing variabel diukur dengan model Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap pernyataan yang diajukan dengan skor 1 (STS=Sangat Tidak Setuju), 2 (TS=Tidak Setuju), 3 (TT=Tidak Tahu), 4 (S=Setuju) dan 5 (SS=Sangat Setuju).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan periode 2009-2014 yang berjumlah 75 orang.

Sampel dalam penelitian ini adalah Anggota Dewan yang membidangi perekonomian dan keuangan (Komisi III) dan anggota Badan Anggaran berjumlah 42 orang.

Teknik analisis data menggunakan Tranformasi Data Ordinal ke Interval dengan *Method of Successive Interval (MSI)*, Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis. Analisis statistik data penelitian menggunakan program *SPSS for Windows 18.00*

Tabel 1
Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Dimensi Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Akuntabilitas Publik (X1)	Pertanggungjawaban secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Standar operasional prosedur akuntabilitas dalam penyusunan LAKIP 2. Pemanfaatan LAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat 3. Kepatuhan terhadap prinsip penyusunan dan mekanisme penyampaian LAKIP. 4. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD 	Ordinal

Partisipasi Masyarakat (X2)	Pelibatan masyarakat dalam setiap aktivitas penganggaran yang dilakukan oleh DPRD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masukan dan kritik dari masyarakat 2. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan APBD 3. Pelibatan masyarakat dalam advokasi konsultasi dan konfirmasi APBD 4. Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat 	Ordinal
Transparansi Kebijakan Publik (X3)	Keterbukaan mengenai anggaran dan kebijakan yang mudah diakses oleh masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbukaan informasi Publik 2. Kemudahan akses publik 3. Ketepatan waktu penyampaian informasi publik 4. Kemampuan transparansi dalam mengakomodasi usulan masyarakat 5. Dukungan Sistem Informasi anggaran 	Ordinal
Prinsip <i>Value For Money</i> (X4)	Pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, ekonomis, adil dan merata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan anggaran secara efektif 2. Pengelolaan anggaran secara efisien 3. Pengelolaan anggaran secara ekonomis 4. Pengelolaan anggaran secara adil 5. Pengelolaan anggaran secara merata 	ordinal
Pengawasan APBD (Y)	Pengawasan saat penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran (APBD).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterlibatan Dewan dalam Penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, pengawasan (evaluasi), dan pertanggungjawaban APBD 2. Pelaksanaan analisis politik dalam proses penyusunan APBD 3. Keterlibatan dalam evaluasi dan tindak lanjut LKPJ APBD 4. Evaluasi terhadap revisi APBD 5. Keyakinan atas penerapan akuntabilitas, partisipasi dan transparansi dalam pelaksanaan APBD 6. Pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Dewan melalui alat-alat kelengkapan DPRD antara lain Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Pembahasan dalam Panitia 	Ordinal

		Khusus (Pansus), Rapat Paripurna, Kunjungan Kerja serta Pengoptimalan Masa Reses
--	--	--

Sumber: Pramita dan Andriyani (2010), Siregar (2011)

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari 42 kuesioner yang distribusikan kembali sebanyak 29 kuesioner (69,05%) dan 13 kuesioner (30,95%) tidak kembali. Dari 29 kuesioner (69,05%) yang kembali terdapat 2 kuesioner (6,89%) yang tidak lengkap, sisanya 27 kuesioner (93,10%) dikategorikan lengkap dan dapat diolah lebih lanjut.

Uji asumsi klasik terdiri dari multikolinieritas dan heterokedastisitas, autokorelasi tidak dilakukan karena data yang diperoleh bukan merupakan data *time series*. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas yang dilihat dari nilai VIF masing-masing variabel penelitian ini, dapat dilihat bahwa semua nilai VIF lebih kecil dari 10. Ini menunjukkan bahwa variabel-variabel dependen dalam penelitian ini bebas dari gejala multikolinearitas.

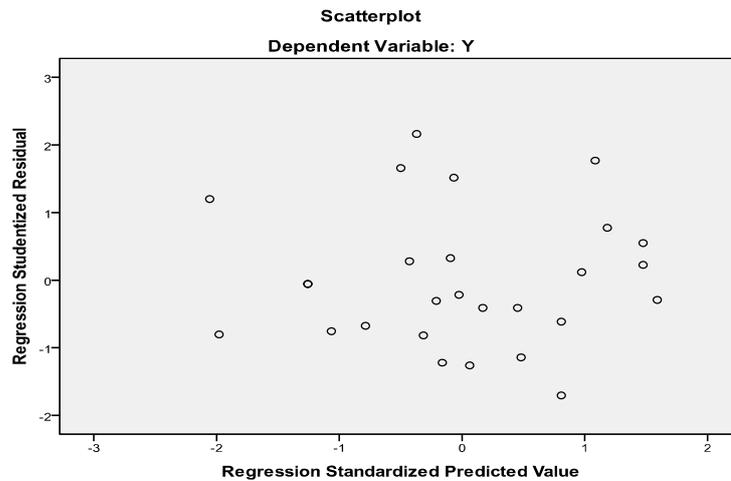
Tabel 2
Uji Multikolinieritas

Variabel	Colinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Akuntabilitas Publik (X1)	0,877	1,141	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Partisipasi Masyarakat (X2)	0,380	2,628	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Transparansi Kebijakan Publik (X3)	0,368	2,716	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Prinsip <i>Value for Money</i> (X4)	0,935	1,069	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat dari gambar 1, dimana dari scatterplot terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar sembarangan di atas dan di bawah angka nol maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Gambar 1



Hasil pengujian pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikat (Uji F) dapat dilihat dari tabel 3. Dari tabel tersebut diperoleh nilai F hitung 5,298 dengan tingkat signifikansi 0,004. Hal ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan prinsip *value for money* secara simultan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Tabel 3

Uji F

Model	Change Statistics				
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,491	5,298	4	22	,004

Sumber: Hasil pengolahan data

Hasil pengujian pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat (uji t) dapat dilihat dari tabel 4. Dari tabel tersebut dapat dilihat hasil uji t ternyata hanya akuntabilitas publik dan prinsip *value for money* yang berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), sedangkan variabel partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Tabel 4
Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	19,201	9,598		2,001	,058
X1	,945	,212	,726	4,465	,000
X2	,057	,374	,038	,153	,880
X3	-,331	,434	-,191	-,763	,453
X4	,455	,206	,347	2,205	,038

Sumber: hasil pengolahan data

Koefisien determinasi (R^2) yang menunjukkan seberapa besar variabel-variabel penjelas mempengaruhi variabel terikat. Nilai R^2 (tabel 3) menunjukkan angka 0,491, artinya 49,10% dari variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen yang diteliti sedangkan sisanya 50,90% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Hal ini menunjukkan masih ada faktor-faktor lain di luar akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan prinsip *value for money* yang berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Dari hasil pengujian F memperlihatkan nilai yang positif signifikan, hal ini menunjukkan hubungan antara variabel akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan prinsip *value for money* dalam

pengawasan keuangan daerah (APBD) adalah positif yaitu semakin tinggi variabel akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan prinsip *value for money* maka semakin tinggi kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

Variabel akuntabilitas publik secara parsial berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Coryanata (2007), Pramita dan Andriyani (2010) yang membuktikan bahwa interaksi antara pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

Akuntabilitas pada sektor publik bersifat *multiple-accountability structure*. Kinerja suatu instansi

pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap atasan, Anggota Dewan, organisasi nonpemerintah, lembaga donor, dan komponen masyarakat lainnya. Semua itu berarti pula, akuntabilitas internal (administratif) dan eksternal ini menjadi sama pentingnya. Eksekutif mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, sampai pada evaluasi. Prinsip akuntabilitas inilah yang mendukung Anggota Dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dengan adanya akuntabilitas publik akan mewujudkan tata pemerintahan yang baik di negara ini.

Hasil penelitian secara statistik menunjukkan variabel partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil penelitian ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Werimon (2007) yang menjadikan partisipasi masyarakat sebagai variable moderasi dan memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBD terlihat belum

optimal, meskipun saat ini telah terjadi reformasi dalam mekanisme penganggaran (APBD) dimana masyarakat sudah seharusnya dilibatkan dalam proses penganggaran. Partisipasi masyarakat secara bersama-sama perlu ditingkatkan lagi agar pengawasan keuangan daerah berjalan efektif dan efisien. Untuk itu perlu adanya koordinasi antar institusi publik seperti LSM, Ormas, Pers sehingga dapat mengoptimalkan peran masyarakat dalam mekanisme APBD terutama dalam hal pengawasan keuangan daerah (APBD).

Transparansi Kebijakan Publik tidak berpengaruh terhadap Pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil Penelitian ini mendukung hasil penelitian Sopanah dan Mardiasmo (2003) yang membuktikan bahwa interaksi antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Mereka menyatakan bahwa transparansi kebijakan publik masih dalam taraf retorika dan implementasinya masih dalam formalitas.

Dalam kenyataannya, Anggota Dewan merespon transparansi kebijakan publik yang dilakukan lembaga

eksekutif berbeda-beda, salah satunya disebabkan oleh akses terhadap informasi kebijakan publik masih sulit dan hanya orang-orang tertentu yang mampu mengaksesnya. Hal ini mendukung fenomena yang ada yang menyatakan tingkat transparansi dari instansi Pemerintah Sumatera Selatan baru mencapai 30-40 persen (Handayani, Kompas, 2010).

Terakhir, penerapan prinsip *value for money* berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Hal ini mengindikasikan bahwa Kriteria pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik dewasa ini adalah ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *Value for Money* dalam keuangan daerah (APBD), yaitu: ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*) dan efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (Siregar, 2011).

D. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa variabel akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, transparansi kebijakan publik dan prinsip *value for money* secara simultan berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD). Hasil uji t memperlihatkan hanya akuntabilitas publik dan prinsip *value for money* yang berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD), sedangkan variabel partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD).

2. Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah jumlah sampel yang diteliti, khususnya pada variabel partisipasi masyarakat, diharapkan kuesioner diberikan kepada masyarakat sehingga tingkat analisis akan lebih akurat.
2. Perlu dilakukan penambahan variabel-variabel lain seperti variabel yang dapat mempengaruhi kinerja DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmadi, Muslim, 2002, *Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta.
- Coryanata, Isma. 2007. *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Handayani, Nunik. 2010. Anggaran Instansi Pemerintah harus Terbuka. *Kompas*, 15 Desember 2010.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Edisi 3. Erlangga: Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta.
- _____. 2003. Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi layanan Publik. *Majalah Swara MEP*. Vol. 3 No. 8 Maret. MEP UGM. Jogjakarta.
- _____. 2006, *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governace*. Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, No.1, Mei 2006.
- Maryono, Werella, Kismartini, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Jawa Tengah*, Dialogue JIAKP, Vol. 4, No. Januari 2007 : 69 – 78.
- Mayasari, Rosalina Pebrica. 2011. *Pengaruh Kualitas Anggota Dewan terhadap Pengawasan APBD dengan Tata Pemerintahan yang Baik sebagai Varibel Moderating*. Tesis S2 Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Ekonomi. Universitas Sriwijaya. (Tidak di Publikasikan).
- Mursyidi, 2009 *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*, Refika Aditama Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.
- Pohan, Max. 2000. *Mewujudkan Tata Pemerintahan Lokal yang Baik (Local Good Governance) dalam Era Otonomi Daerah*. Disampaikan pada Musyawarah Besar Pembangunan Musi Banyuasin ketiga, Sekayu, 29 September –1 Oktober 2000.
- Pramita, Yulinda Devi dan Andriyani, Lilik. 2010. *Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD)*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII Purwokerto.
- Pramono, Agus H. 2002. *Pengawasan Legislative terhadap Eksekutif dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Tesis S2 Program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Negara. Universitas Brawijaya Malang. (Tidak di Publikasikan).
- Siregar, Liper. 2011. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Variabel Moderator pada Pemerintah Kota Pematangsiantar*. Tesis S2 Program Pasca Sarjana Program Studi Akuntansi. Universitas Sumatera Utara. (Tidak di Publikasikan).
- Sopannah dan Mardiasmo. 2003. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah*. Simposium

- Nasional Akuntansi (SNA) VI 16-17 Oktober di Surabaya.
- Wardayani. 2010. *Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Kinerja DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah dengan Komitmen Profesional sebagai Variabel Moderasi*. Tesis S2 Program Pasca Sarjana Program Studi Akuntansi. Universitas Sumatera Utara. (Tidak di Publikasikan).
- Werimon, Simson, Ghozali, Imam, dan Nazir, Mohamad. 2007. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah*, Artikel, Simposium Nasional Hasil Penelitian Akuntansi 10, Makasar.
- Yuriyuda. 2010. *MSI (Method of Successive Interval) Langkah Manual dan Software*. www.carabineri.wordpress.com. Diakses tanggal 10 Juni 2011.